

ASEAN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT PROGRAMME SEBAGAI MANIFESTASI REGIONALISME BARU DALAM INTEGRASI KAWASAN YANG INKLUSIF

Rifka Amalia^{1*}

^{1*}Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas, Indonesia
E-mail: rifka.amalia@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis ASEAN *Social Enterprise Development Programme* (ASEAN SEDP) sebagai manifestasi dari pendekatan Regionalisme Baru dalam kerangka integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara. ASEAN SEDP merupakan program berbasis kemitraan multi-pihak (*Multi-Stakeholder Partnerships/MSPs*) yang dirancang untuk memberdayakan wirausaha sosial muda melalui pelatihan, pendampingan bisnis, akses pembiayaan, serta jejaring lintas sektor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan data sekunder. Temuan utama menunjukkan bahwa ASEAN SEDP mencerminkan prinsip-prinsip Regionalisme Baru, seperti keterlibatan aktor plural lintas sektor, pendekatan dari bawah (*bottom-up*), serta orientasi multidimensional yang tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi tetapi juga pemberdayaan komunitas akar rumput. Berbeda dengan ASEAN-BAC dan ACCMSME yang cenderung elitis dan teknokratik, ASEAN SEDP berhasil membangun model integrasi kawasan yang lebih inklusif dan kontekstual melalui wirausaha sosial (*social entrepreneurship*). Studi kasus dari peserta ASEAN SEDP menunjukkan dampak nyata berupa penciptaan lapangan kerja bagi kelompok rentan, peningkatan kapasitas wirausaha, serta perluasan solidaritas sosial antarwarga ASEAN. Penelitian ini merekomendasikan agar model kolaboratif seperti ASEAN SEDP direplikasi dan diintegrasikan ke dalam kebijakan regional ASEAN secara lebih sistematis sebagai pelengkap inisiatif ekonomi formal, demi memperkuat integrasi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di kawasan.

Kata Kunci: *Integrasi Kawasan; Regionalisme Baru; ASEAN SEDP; Multi-Stakeholder Partnership; Social Enterprises*

ABSTRACT

This study analyzes the ASEAN Social Enterprise Development Programme (ASEAN SEDP) as a manifestation of the New Regionalism approach within the framework of Southeast Asian economic integration. ASEAN SEDP is a multi-stakeholder partnership (MSP)-based initiative designed to empower young social entrepreneurs through training, business mentoring, access to finance, and cross-sectoral networking. Employing a descriptive-analytical qualitative method and relying on secondary data, this study finds that ASEAN SEDP reflects the key principles of New Regionalism, including the involvement of plural cross-sectoral actors, a bottom-up approach, and a multidimensional orientation

Diserahkan : 2025-03-22,
Direvisi : 2025-04-21,
Diterima : 2025-08-05

Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial dilisensikan di bawah Lisensi | 205
Creative Commons Atribusi-NonKomersial
4.0 Internasional. (CC BY-NC 4.0)



that emphasizes not only economic growth but also grassroots community empowerment. In contrast to more elite and technocratic mechanisms such as ASEAN-BAC and ACCMSME, ASEAN SEDP offers a more inclusive and context-sensitive model of regional integration through social entrepreneurship. Case studies of ASEAN SEDP participants demonstrate tangible impacts, including job creation for vulnerable groups, enhanced entrepreneurial capacity, and the strengthening of social solidarity among ASEAN citizens. This study recommends that collaborative models such as ASEAN SEDP be replicated and systematically integrated into ASEAN's regional policy frameworks as complementary to formal economic initiatives, in order to promote a more inclusive and equitable regional economic integration.

Keywords: *Regional Integration; New Regionalism; ASEAN SEDP; Multi-Stakeholder Partnership; Social Enterprises*

PENDAHULUAN

Integrasi kawasan ASEAN telah lama menjadi agenda strategis yang diwujudkan melalui kerangka *ASEAN Economic Community* (AEC), yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2015. AEC dirancang untuk memperdalam integrasi ekonomi regional dengan mendorong pergerakan bebas jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil. Melalui inisiatif ini, ASEAN menargetkan pembentukan pasar tunggal dan basis produksi di kawasan Asia Tenggara. Untuk mencapai tujuan tersebut, AEC mengedepankan pendekatan liberalisasi pasar, peningkatan konektivitas perdagangan, serta penguatan daya saing kawasan sebagai fondasi utama integrasi ekonomi kawasan (ASEAN Economic Community Blueprint, 2008).

Namun, seiring berkembangnya tantangan sosial-ekonomi global dan meningkatnya kesenjangan pembangunan di dalam kawasan, ASEAN menyadari pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif. Hal ini ditandai dengan dirumuskannya Cetak Biru AEC 2025 yang tidak hanya menekankan keberlanjutan dan daya saing, tetapi juga menegaskan perlunya integrasi ekonomi yang berbasis masyarakat (*people-centred*) dan berorientasi pada masyarakat (*people-oriented*) (Hildebrandt dan Halver, 2023). Pergeseran paradigma ini mencerminkan adopsi prinsip-prinsip Regionalisme Baru, yaitu pendekatan integrasi yang lebih multidimensi, melibatkan aktor plural, serta responsif terhadap persoalan sosial, budaya, dan keberlanjutan pembangunan (Grant et al., 2022).

Meskipun secara normatif AEC 2025 telah mengadopsi nilai-nilai Regionalisme Baru, dalam praktiknya integrasi ekonomi kawasan masih didominasi oleh pendekatan teknokratik dan birokratik. Entitas seperti ASEAN *Business Advisory Council* (ASEAN-BAC) dan ASEAN *Coordinating Committee on Micro, Small, and Medium Enterprises* (ACCMSME) menunjukkan keterbatasan dalam mengakomodasi suara pelaku usaha kecil, komunitas akar rumput, perempuan, serta kelompok rentan. Mekanisme konsultatif masih bersifat *top-down* dan eksklusif, sementara partisipasi langsung masyarakat sipil tetap belum terakomodasi.

Dalam konteks tersebut, ASEAN memerlukan pendekatan alternatif yang mampu menjembatani visi integrasi regional yang lebih inklusif dengan kebutuhan konkret masyarakat. ASEAN *Social Enterprise Development Programme* (ASEAN SEDP) yang diprakarsai oleh ASEAN Foundation merupakan salah satu inisiatif yang menawarkan

pendekatan baru terhadap integrasi kawasan. Berfokus pada pemberdayaan wirausaha sosial muda, program ini menggabungkan pelatihan, mentoring, akses pembiayaan, dan promosi digital melalui kolaborasi dengan berbagai aktor lintas sektor seperti GIZ, SAP, dan TikTok. ASEAN SEDP menjadi ruang eksperimental bagi kolaborasi antara aktor negara dan non-negara dalam menjawab tantangan pembangunan sosial-ekonomi (ASEAN SEDP, 2021).

Berbeda dari entitas resmi ASEAN lainnya, ASEAN SEDP mengadopsi pendekatan *Multi-Stakeholder Partnerships* (MSPs) yang bersifat horizontal dan berbasis komunitas. Program ini tidak hanya membangun kapasitas individu peserta, tetapi juga menunjukkan dampak nyata pada komunitas marjinal, seperti perempuan di wilayah terpinggirkan, penyandang disabilitas, dan anak berkebutuhan khusus. Dengan menempatkan wirausaha sosial sebagai subjek aktif perubahan, ASEAN SEDP menunjukkan bahwa integrasi regional dapat dijalankan dari bawah (*bottom-up*), melalui solidaritas dan kolaborasi antaraktor lintas batas. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana *ASEAN Social Enterprise Development Programme* mencerminkan praktik Regionalisme Baru dalam mendorong integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan menempatkan *Multisectoral Partnership* sebagai pendekatan implementatif yang menjelaskan dinamika dan struktur kolaborasi antar-aktor dalam program ini. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam studi integrasi kawasan dan studi hubungan internasional secara luas.

KAJIAN TEORI

Teori Regionalisme Baru

Söderbaum (2003) mendefinisikan Regionalisme Baru sebagai serangkaian hubungan 'segitiga' tingkat menengah yang bersifat formal maupun informal, tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga aktor non-negara seperti masyarakat sipil dan perusahaan swasta. Teori Regionalisme Baru berusaha untuk melampaui fokus pada negara sebagai aktor utama regionalisasi. Oleh karena itu, pada Regionalisme Baru tidak terbatas hanya pada organisasi dan lembaga regional antar-negara formal.

Regionalisme Baru dianggap sebagai gelombang atau era regionalisme saat ini. Oleh karena itu, memahami perbandingan antara regionalisme lama dan baru menjadi penting untuk memahami pendekatan ini. Hettne (2003) menjelaskan bahwa regionalisme lama dipahami sebagai fenomena yang didorong oleh negara, dengan menekankan kawasan makro sebagai hasil kerja sama antarnegara yang berdekatan secara geografis. Pendekatan ini bersifat *top-down* karena berfokus pada hubungan antarnegara. Sebaliknya, regionalisme baru merupakan bagian dari transformasi struktural global yang dipengaruhi oleh arus globalisasi, ditandai dengan keterlibatan berbagai aktor non-negara yang berperan di berbagai tingkat dalam sistem internasional. Dengan demikian, terjadi pergeseran fokus dari pendekatan yang berorientasi negara menuju pendekatan yang lebih inklusif terhadap keberagaman aktor.

Menurut Söderbaum (2003), Regionalisme Baru memiliki karakteristik multidimensi, kompleks, cair, dan tidak terikat pada pola atau norma baku, serta melibatkan aktor negara dan non-negara yang seringkali membentuk koalisi secara informal. Prinsip multidimensi menekankan bahwa regionalisme baru mampu menjawab berbagai persoalan lintas isu seperti ekonomi, keamanan, dan lingkungan, yang tidak dapat diselesaikan secara efektif di tingkat nasional maupun melalui mekanisme pasar (Hettne, 2003). Selain negara, aktor lain yang terlibat mencakup LSM, gerakan sosial, media, perusahaan, dan sektor informal, sehingga regionalisme baru bersifat pluralistik baik dalam praktik, teori, maupun identitas pelakunya (Bøås et al., 1999). Kompleksitas dan fluiditasnya tampak dari pengaruh globalisasi sebagai faktor eksternal yang membentuk dinamika kawasan, berbeda dari regionalisme lama yang memandang integrasi sebagai hasil kerja sama terencana antarnegara. Regionalisme baru juga berkembang secara *bottom-up*, tumbuh dari dalam kawasan melalui dorongan sukarela untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan global, termasuk kemungkinan berbagi sebagian kedaulatan (Hettne, 2003).

Konsep *Multi-Stakeholder Partnerships* (MSPs)

Multi-stakeholder Partnership (MSPs) didefinisikan oleh *Centre for Development Innovation* sebagai proses pembelajaran interaktif, pemberdayaan, dan tata kelola partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan berbeda, namun tujuan yang saling terkait, guna menghadapi risiko, krisis, dan peluang secara kolektif di lingkungan yang kompleks (Brouwer et al., 2015). Sementara itu, PBB mendefinisikan MSPs sebagai kemitraan sukarela dan kolaboratif antara aktor publik dan non-publik yang sepakat bekerja sama mencapai tujuan bersama, dengan berbagi risiko, tanggung jawab, sumber daya, dan manfaat (United Nations, 2015).

Bentuk MSPs beragam, mulai dari konsultasi singkat hingga keterlibatan jangka panjang dengan struktur formal maupun bersifat fleksibel dan ad hoc. Inisiasi MSPs dapat dilakukan oleh pemerintah, NGO, sektor bisnis, masyarakat sipil, maupun akademisi, bergantung pada isu yang diangkat. Pemerintah seringkali menggunakan MSPs untuk merumuskan kebijakan, sementara NGO berperan menjembatani sektor bisnis dan pemerintah dalam isu sosial atau lingkungan. Bagi masyarakat sipil dan pemerintah, akses sumber daya merupakan alasan utama bergabung, sedangkan bagi bisnis, kemitraan ini membuka peluang pasar, membangun reputasi, memperoleh legitimasi, dan memengaruhi regulasi (Brouwer et al., 2015; Eweje et al., 2021). Dengan demikian, bentuk MSP sangat bergantung pada tujuan aktor yang terlibat.

Menurut Brouwer et al. (2015), keunggulan MSP terletak pada kemampuannya memfasilitasi penyelesaian masalah kompleks melalui kolaborasi, saling melengkapi keterampilan dan sumber daya, serta menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan dan berpotensi memicu perubahan sistemik. Namun demikian, MSP memerlukan waktu, sumber

daya, dan keterlibatan aktor yang memadai. Hasilnya bersifat jangka panjang dan pendanaan sering menjadi tantangan karena sifatnya yang terbuka dan dinamis (Brouwer et al., 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analisis. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa bagaimana *ASEAN Social Enterprise Development Programme* (ASEAN SEDP) mencerminkan nilai-nilai regionalisme baru dalam mendorong integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini berfokus pada interpretasi makna, pola keterlibatan aktor, serta dinamika implementasi program ASEAN SEDP dalam kerangka integrasi regional ASEAN.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yang mencakup berbagai dokumen dan sumber informasi yang relevan dengan topik yang diangkat pada penelitian ini. Data sekunder pada penelitian ini dikumpulkan melalui *metode triangulasi* dengan sumber yang mencakup dokumen-dokumen resmi ASEAN dan ASEAN Foundation (seperti cetak biru, laporan kegiatan, dan publikasi program), artikel jurnal akademik, buku, laporan kebijakan, berita daring, serta wawancara video yang dipublikasikan secara terbuka oleh ASEAN Foundation melalui kanal YouTube resminya. Wawancara-wawancara tersebut menampilkan testimoni langsung dari para peserta ASEAN SEDP, yang dinilai dapat memperkaya perspektif implementasi program dari sisi pelaku, terutama dalam konteks capaian dan dampak sosial ekonomi.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan *content analysis*, dengan mengidentifikasi nilai-nilai dari Regionalisme Baru, seperti aktor plural, multidimensional, dan pendekatan *bottom-up*, yang kemudian dicocokkan dengan desain program serta implementasi ASEAN SEDP. Penelitian ini juga menggunakan konsep *Multi-stakeholder Partnership* yang digunakan sebagai konsep pelengkap untuk menganalisis keterlibatan aktor negara maupun non-negara lintas sektor yang bergabung pada program tersebut.

Selain itu, untuk memperkuat dimensi komparatif dan menanggapi keterbatasan literatur yang fokus pada satu program, penelitian ini juga menyisipkan perbandingan ringkas dengan dua inisiatif kebijakan regional lain dalam ekosistem integrasi ekonomi ASEAN, yaitu ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) dan ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Enterprises (ACCMSME). Perbandingan dilakukan dengan menyusun tabel analitis sebagai berikut:

Tabel 1. Komparasi ASEAN SEDP, ASEAN-BAC, dan ACCMSME

Entitas	Tujuan Utama	Aktor Utama	Capaian
ASEAN SEDP	Memberdayakan wirausaha sosial muda dan memperkuat ekosistem kewirausahaan sosial untuk inklusi sosial	ASEAN Foundation, GIZ, SAP, TikTok, wirausaha sosial muda, mentor/pakar, investor	133.143 penerima manfaat; 70 social enterprise didukung (74% dipimpin perempuan); keterlibatan digital & SDGs
ASEAN-BAC	Mewakili kepentingan sektor bisnis dalam integrasi ekonomi ASEAN, memberikan rekomendasi kebijakan, serta bertindak sebagai penasihat kebijakan dan rencana aksi	Pelaku bisnis dari tiap negara anggota ASEAN (ditunjuk oleh negara/dewan), bekerja dengan mitra sektor publik & swasta	Forum konsultatif utama pelaku usaha di ASEAN, berpartisipasi secara terbatas dalam proses pengambilan keputusan
ACCMSME	Mengembangkan kebijakan dan program, pengawasan implementasi program, dan dukungan strategis bagi pertumbuhan UMKM di ASEAN	Perwakilan kementerian/lembaga yang menangani UMKM dari negara anggota ASEAN; kolaborasi dengan sektor privat & NGO	Strategi penguatan UMKM ASEAN; koneksi ke ASEAN Access, ASEAN SME Academy, dan ASEAN Mentorship Network

PEMBAHASAN

Perubahan Paradigma Integrasi Ekonomi: AEC 2015 dan AEC 2025

ASEAN berkomitmen untuk memperdalam integrasi ekonominya, yang semula berfokus pada arus bebas barang (*free flow of goods*) menjadi arus bebas investasi, jasa, dan modal. ASEAN *Economic Community* (AEC) hadir menjadi jalan utama untuk mentransformasikan integrasi ekonomi dari intra-perdagangan menjadi intra-investasi (Verico, 2022). AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan berbasis produksi, kawasan ekonomi yang kompetitif, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan kawasan yang terintegrasi sepenuhnya dalam ekonomi global (Chia, 2013). Berdasarkan Cetak Biru AEC 2015, setidaknya terdapat 4 pilar dalam AEC 2015 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Cetak Biru AEC 2015

Pillar	Core Elements
A. Single market and production base	<ol style="list-style-type: none"> 1. Free flow of goods 2. Free flow of services 3. Free flow of investment 4. Free flow of capital 5. Free flow of skilled labour 6. Priority integration sectors

	7. Food, agriculture, and forestry
B. Competitive economic region	1. Competition policy 2. Consumer protection 3. Intellectual property rights 4. Infrastructure development 5. Taxation 6. E-commerce
C. Equitable economic development	1. SME-development 2. Initiative for ASEAN development
D. Integration into the global economy	1. Coherent approach to external economix relations 2. Enhanced participation in global supply networks

Sumber: ASEAN Economic Community Blueprint, 2008; Hildebrandt & Halver, 2023

Pencapaian yang dihasilkan dari AEC 2015 cukup signifikan, terutama dalam hal liberalisasi perdagangan, seperti penghapusan tarif intra-ASEAN dan peluncuran inisiatif seperti *ASEAN Single Window* dan *Trade Facilitation Framework*. Tidak hanya itu, ASEAN juga memperluas konektivitas global melalui kemitraan ekonomi dengan China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan Selandia Baru (Hildebrandt dan Halver, 2023). Namun demikian, pendekatan ini terlalu menekankan aspek makroekonomi dan masih bersifat negara-sentris. Pilar B dan C yang berorientasi pada pemerataan pembangunan dan penguatan sektor akar rumput, seperti UMKM, sayangnya tidak mencapai hasil yang optimal. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan ketegasan ASEAN terhadap komitmen negara anggota serta kompleksitas kebijakan lintas sektor, sehingga menyebabkan isu inklusivitas ekonomi dan ketimpangan sosial belum terselesaikan (Shimizu, 2021; Ishikawa, 2021).

ASEAN berupaya melibatkan aktor non-negara dalam implementasi AEC 2015 melalui pembentukan *ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC)* yang mewakili sektor swasta dari perusahaan besar hingga UMKM dan memberikan masukan kepada pemerintah. Namun, karena perwakilan ASEAN-BAC ditunjuk pemerintah dan kepemimpinannya mengikuti sistem keketuaan ASEAN, prosesnya masih *top-down* dan negara-sentris, sehingga kurang inklusif terhadap pelaku usaha akar rumput dan lebih merepresentasikan elit bisnis (Sundram, 2025; Chandra et al., 2017; Karim & Heryanto, 2022). Di sisi lain, untuk melibatkan UMKM, ASEAN membentuk *ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Enterprises (ACCMSME)* yang menghubungkan kebijakan ASEAN dengan program nasional, serta melibatkan sektor swasta melalui *ASEAN MSME Advisory Board (AMAB)* sebagai pemberi masukan strategis (Khoirunnisa, 2024; ASEAN Secretariat, 2024). Meski memiliki pendekatan berbeda, baik ASEAN-BAC maupun ACCMSME sama-sama menunjukkan kecenderungan pendekatan *top-down* dan negara-sentris yang membatasi partisipasi langsung pelaku usaha di tingkat akar rumput.

Sebagai respons terhadap keterbatasan AEC 2015, ASEAN meluncurkan Cetak Biru AEC 2025 dengan pendekatan yang lebih reflektif terhadap kebutuhan kawasan. AEC 2025 menegaskan pentingnya integrasi ekonomi yang inklusif, resilien, inovatif, dan berorientasi pada masyarakat (*people-oriented and people-centred ASEAN*), sesuai dengan Pilar Keempat

ACE 2025. Untuk mencapai tujuan tersebut, ASEAN perlu memperkuat peran UMKM dan sektor swasta, mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta (*Public-private partnerships*), mengurangi kesenjangan pembangunan, serta meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses integrasi kawasan (ASEAN Secretariat, 2015). Berdasarkan hal tersebut, maka pada AEC 2025 tidak lagi berfokus pada liberalisasi pasar, namun lebih ke penyediaan fasilitas perdagangan yang mengedepankan peran dari sektor swasta, UMKM, dan masyarakat sipil, menggeser fokusnya lebih ke isu sosio-ekonomi, serta berbasis masyarakat (*people-centered*) (Maria et al., 2017).

Pergeseran dari AEC 2015 ke AEC 2025 mencerminkan transisi dari pendekatan regionalisme lama (*state-led, market-oriented*) menuju prinsip-prinsip Regionalisme Baru. Meskipun AEC 2015 menunjukkan pola integrasi yang mengadopsi pendekatan Regionalisme Baru melalui kolaborasi dengan aktor non-negara, dominasi peran negara masih kuat, sehingga integrasi tersebut kerap merefleksikan prinsip-prinsip Regionalisme Lama. Dalam pendekatan Regionalisme Baru ini, integrasi kawasan tidak lagi semata-mata dipahami sebagai liberalisasi pasar, melainkan sebagai upaya multidimensional yang melibatkan aktor plural, mendorong partisipasi publik, serta menekankan dimensi sosial-ekonomi pembangunan. Dalam kerangka ini, pelaku masyarakat sipil, UMKM, dan pemuda diposisikan bukan sekadar sebagai penerima manfaat kebijakan, melainkan sebagai subjek aktif dalam transformasi kawasan.

Walaupun secara normatif AEC 2025 telah mengadopsi prinsip-prinsip Regionalisme Baru, implementasi aktualnya masih menghadapi tantangan. Integrasi masih banyak didorong oleh logika pasar, dengan keterlibatan aktor non-negara yang seringkali bersifat simbolik atau terbatas pada konsultasi satu arah. Representasi UMKM dan komunitas akar rumput dalam forum pengambilan keputusan regional belum sepenuhnya setara. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis inisiatif alternatif yang secara operasional mencerminkan prinsip-prinsip Regionalisme Baru dan pendekatan multi-aktor yang lebih partisipatif.

ASEAN Social Enterprise Development Programme (ASEAN SEDP) hadir sebagai salah satu contoh dari upaya strategis untuk menjembatani visi normatif AEC 2025 dengan kebutuhan konkret penguatan ekonomi masyarakat. Berbeda dari pendekatan formal kelembagaan seperti ASEAN-BAC atau ACCMSME, ASEAN SEDP menerapkan model kemitraan multi-pemangku kepentingan yang lebih fleksibel, horizontal, dan berbasis komunitas. Program ini menekankan pada penguatan kapasitas wirausaha sosial muda, mendukung inisiatif akar rumput, serta melibatkan berbagai mitra lintas sektor seperti GIZ, SAP, dan TikTok, sehingga mencerminkan bentuk regionalisme yang lebih inklusif dan transformatif. Oleh karena itu, ASEAN SEDP bukan hanya relevan sebagai studi kasus teknis, tetapi juga penting sebagai lensa analitik untuk memahami model baru integrasi kawasan yang partisipatif, berkeadilan, dan memiliki dimensi sosial. Dalam konteks ini, ASEAN SEDP tidak sekadar menjadi program pembangunan ekonomi, melainkan juga ekosistem kolaboratif yang mencerminkan praktik *governance beyond the state* di Asia Tenggara.

ASEAN SEDP dalam Perspektif Regionalisme Baru dan *Multi-stakeholder Partnership*

ASEAN *Social Enterprise Development Programme* (ASEAN SEDP) merupakan inisiatif yang dikembangkan oleh ASEAN Foundation dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan sosial-ekonomi serta memperkuat ekosistem kewirausahaan sosial di kawasan ASEAN melalui dukungan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Program ini dirancang untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing melalui pemberdayaan *social entrepreneurship* sebagai agen perubahan. Melalui pelatihan, pendampingan bisnis, akses terhadap investor, dan pemberian hibah awal, ASEAN SEDP diharapkan mampu menciptakan ekosistem wirausaha sosial yang tidak hanya kompeten secara ekonomi, namun juga peka terhadap kebutuhan dan potensi komunitas lokal (ASEAN SEDP, 2021).

ASEAN SEDP berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung pada ASEAN *Economic Community* dan ASEAN *Socio-Cultural Community* dalam praktiknya yang mengutamakan inklusi dan keberlanjutan. ASEAN SEDP secara khusus bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya kewirausahaan sosial bagi generasi muda di ASEAN. Sejak peluncurannya di tahun 2021, ASEAN SEDP telah bekerja sama dengan beberapa mitra lintas sektor, seperti GIZ (representasi Pemerintah Jerman dalam kerja sama pembangunan), SAP (perusahaan teknologi global), dan TikTok (platform media sosial global). Tidak hanya itu, dalam pelaksanaan program ini, ASEAN SEDP juga melibatkan mentor dan pakar dari berbagai disiplin, serta menjadi koordinasi dengan ASEAN *Coordinating Committee on Micro, Small, and Medium Enterprises* (ACCMSME) sebagai penghubung antara pelaku usaha sosial dengan kerangka kebijakan ASEAN dan jaringan investor di tingkat regional (ASEAN SEDP, 2021).

Social entrepreneurship merupakan fenomena yang berkembang secara global, termasuk di ASEAN. *Social entrepreneurship* dapat didefinisikan sebagai bentuk usaha yang mengutamakan dampak sosial dibandingkan keuntungan finansial, serta memberikan solusi inovatif terhadap permasalahan sosial, budaya, dan lingkungan. Usaha ini memadukan misi sosial dengan model bisnis berorientasi laba (UN DESA, 2018; Crosta & Sanders, 2021). Berdasarkan data USAID (2019), Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam merupakan negara dengan jumlah wirausaha sosial terbanyak, masing-masing mencapai ratusan ribu. Sementara itu, Kamboja, Malaysia, dan Singapura memiliki puluhan ribu, sedangkan Brunei Darussalam dan Laos masih menunjukkan jumlah yang rendah. Jenis dan sektor usaha sosial sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan sosial di masing-masing negara, sehingga pengembangannya pun disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, wirausaha sosial kerap menghadapi tantangan, seperti ketidakjelasan status hukum, pengelolaan organisasi, dan keterbatasan akses pendanaan (Crosta & Sanders, 2021). Kondisi ini menunjukkan pentingnya program seperti ASEAN *Social Enterprise Development Programme* (ASEAN SEDP) untuk mendukung penguatan dan keberlanjutan wirausaha sosial di kawasan.

Hingga saat ini, ASEAN SEDP telah dilaksanakan sebanyak tiga kali sejak diluncurkan pada tahun 2021 hingga 2023, dan telah memasuki fase keempat pada 2025. Selama tiga fase tersebut, program ini telah memberdayakan setidaknya 133.143 orang di Asia Tenggara dan mendukung 70 wirausaha sosial, di mana 74% dipimpin oleh perempuan dan 22% berkontribusi dalam membuka lapangan kerja bagi penyandang disabilitas (ASEAN SEDP, 2021). Pencapaian ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya bersifat eksklusif bagi kelompok tertentu, namun juga membuka kesempatan bagi siapa pun yang memiliki visi sosial dan komitmen terhadap perubahan komunitas. Pada implementasinya, ASEAN SEDP menyediakan berbagai layanan seperti pelatihan daring, mentoring bisnis, akses pembiayaan, serta promosi publik melalui kampanye sosial digital, seperti TikTok Challenge, yang menjadi salah satu inovasi dalam menjangkau publik muda ASEAN (Laoli, 2024).

Sebagai program regional yang berupaya menguatkan ekosistem kewirausahaan sosial dalam proses integrasi ekonomi kawasan, ASEAN SEDP telah menunjukkan berbagai dampak nyata, terutama di tingkat komunitas akar rumput. Evaluasi kualitatif melalui wawancara yang dilakukan oleh ASEAN Foundation (ditayangkan melalui kanal YouTube resminya) terhadap peserta ASEAN SEDP mengungkapkan bahwa program ini tidak hanya memberikan dukungan pelatihan kewirausahaan, tetapi juga membuka akses pendanaan dan koneksi dengan investor yang krusial bagi keberlanjutan usaha sosial mereka. Mayoritas peserta menyampaikan bahwa pelatihan intensif dalam manajemen bisnis dan pengembangan model usaha sangat membantu mereka yang sebelumnya belum memiliki kapasitas manajerial yang kuat. Selain itu, fasilitas pendanaan dalam bentuk hibah yang diberikan pada fase akhir program, khususnya saat sesi *Demo Day*, mendorong peserta untuk mengembangkan proyeknya lebih lanjut secara mandiri.

Lebih jauh, dampak sosial-ekonomi ASEAN SEDP dapat dilihat dari beberapa studi kasus peserta program, seperti Rubysh dari Indonesia (ASEAN SEDP 1.0), Tohe Project dari Vietnam (ASEAN SEDP 2.0), dan LeLao Project dari Lao PDR (ASEAN SEDP 3.0). Rubysh dan LeLao Project memiliki perhatian utama pada pemberdayaan perempuan marjinal di wilayah terpencil atau terpinggirkan. Rubysh, misalnya, membuka pelatihan keterampilan bagi perempuan yang tinggal di sekitar area tempat pembuangan sampah untuk mengubah sampah menjadi aksesoris bernilai jual. Dengan menjual produk hasil karya tersebut melalui situs resmi Rubysh, perempuan-perempuan ini tidak hanya memperoleh penghasilan mandiri, tetapi juga memperoleh akses pada bentuk pekerjaan yang berkelanjutan dan bermartabat (Amir, 2021).

Sama dengan Rubysh, LeLao Project di Lao PDR menjalankan program utama bertajuk *One Master One Masterpiece (OMOM)* yang menyoal perempuan penenun di wilayah rural. Proyek ini mendampingi tiga penenun untuk menghasilkan karya tenun yang unik, lalu membantu mereka mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HAKI) atas desain tersebut. Produk-produk hasil tenunan kemudian dipasarkan dalam bentuk barang jadi, memungkinkan para penenun memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus memperkuat pengakuan hukum atas hasil karya mereka (Vongphachanh, 2025).

Sementara itu, Tohe Project dari Vietnam fokus pada isu eksklusif sosial yang dihadapi anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan bekerja sama dengan pusat layanan sosial, Tohe Project memberikan pelatihan seni rupa kepada anak-anak disabilitas. Hasil karya seni mereka, seperti gambar atau lukisan, diubah menjadi desain seni yang kemudian diproduksi menjadi barang-barang seperti tas, buku catatan, dan aksesoris lainnya. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri anak-anak tersebut, tetapi juga membuka jalur inklusi sosial dan ekonomi yang sebelumnya sangat terbatas. Dalam wawancaranya bersama ASEAN Foundation, tim Tohe Project melaporkan adanya peningkatan penjualan sebesar 6% setelah mengikuti pelatihan bisnis dan mentoring dari ASEAN SEDP (Thu, 2024).

Capaian-capaian konkret di atas menunjukkan bahwa ASEAN SEDP tidak hanya berkontribusi dalam penguatan kapasitas individu dan komunitas, tetapi juga mencerminkan arah baru integrasi regional yang lebih partisipatif dan berorientasi sosial. Dengan melibatkan berbagai aktor lintas sektor dalam mendesain dan mengimplementasikan solusi atas permasalahan sosial-ekonomi di kawasan, ASEAN SEDP menghadirkan model kerja sama regional yang tidak lagi bergantung pada peran dominan negara, melainkan menjadikan kolaborasi inklusif sebagai kekuatan utamanya. Dalam konteks inilah, pendekatan *Regionalisme Baru* dan kerangka *Multi-Stakeholder Partnerships (MSPs)* menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana ASEAN SEDP merepresentasikan bentuk baru integrasi kawasan yang lebih responsif, inklusif, berbasis komunitas, dan berkelanjutan.

Salah satu dimensi *Regionalisme Baru* pada ASEAN SEDP yang paling menonjol adalah pendekatannya yang **multidimensional**, di mana program ini mampu menjawab berbagai persoalan lintas isu seperti ekonomi, keamanan, dan lingkungan, yang tidak dapat diselesaikan secara efektif di tingkat nasional maupun melalui mekanisme pasar (Hettne, 2003). Program ini didesain tidak hanya mendorong peningkatan kapasitas bisnis, namun juga merespons berbagai tantangan sosial seperti pengangguran, ketimpangan gender, dan keterbatasan akses kelompok disabilitas terhadap peluang ekonomi. Dengan melibatkan generasi muda sebagai pelaku utama dalam merancang solusi atas permasalahan di daerah mereka, ASEAN SEDP turut mendorong terciptanya integrasi sosial-ekonomi yang lebih merata. Program ini juga sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)*, karena mengukur keberhasilan tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari dampak perubahan sosial yang dihasilkan (ASEAN SEDP, 2021).

Prinsip *Regionalisme Baru* yang terlihat pada ASEAN SEDP adalah keterlibatan aktor plural yang saling melengkapi satu sama lain. Menurut Söderbaum (2003) dan Hettne (2003), nilai penting dalam *Regionalisme Baru* adalah keterlibatan aktor-aktor non-negara dalam dinamika integrasi kawasan. ASEAN Foundation, sebagai lembaga inisiator, memainkan peran fasilitator yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan. Mitra pembangunan internasional seperti GIZ memberikan kerangka kerja keberlanjutan dan modal teknis. SAP menawarkan dukungan dalam bentuk inovasi teknologi dan pengembangan model bisnis, sementara TikTok menjadi alat kampanye dan mobilisasi sosial yang menjangkau publik muda.

Di sisi lain, wirausaha sosial muda menjadi pelaku utama yang merancang, melaksanakan, dan mengembangkan proyek-proyek sosial berbasis komunitas. Dengan melibatkan pakar dan mentor lintas sektor, penguatan kapasitas berlangsung bersamaan antara peningkatan keterampilan dan perluasan jaringan profesional. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan integrasi regional yang lebih horizontal dan partisipatif.

Bentuk kerja sama yang diterapkan pada ASEAN SEDP dapat dikategorikan sebagai praktik *Multi-Stakeholder Partnerships* (MSPs). Melalui konsep ini, kolaborasi yang terjadi di ASEAN SEDP dibangun atas dasar kemitraan sukarela antara aktor dengan latar belakang, kepentingan, dan sumber daya berbeda, namun diarahkan pada tujuan bersama yang disepakati. Menurut Brouwer et al. (2015) dan UN DESA (2018), kelebihan kerja sama MSPs terletak ada pada kemampuannya menangani situasi yang rumit dan menciptakan solusi jangka panjang lewat kerja sama antara berbagai sektor. ASEAN SEDP menunjukkan bagaimana konsep ini diimplementasikan secara nyata di Asia Tenggara, di mana perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan sistem pemerintahan membutuhkan pendekatan yang fleksibel dan kerja sama antar berbagai pihak yang terlibat (Brouwer et al., 2015; Eweje et al., 2021; ASEAN SEDP, 2021).

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dikatakan ASEAN SEDP merepresentasikan model integrasi regional yang tidak hanya dibangun melalui negosiasi antar negara saja, namun melalui jaringan kerja sama antarsektor yang melintasi batas-batas negara. Melalui pendekatan Regionalisme Baru dan praktik MSPs, ASEAN SEDP menjadi contoh bagaimana integrasi regional dapat dijalankan dengan pendekatan yang lebih responsif, adil, dan adaptif terhadap realitas di tingkat akar rumput. Program ini membuktikan bahwa agenda pembangunan ekonomi dan integrasi ekonomi kawasan tidak harus berfokus pada pasar dan negara saja, melainkan dapat dijalankan dengan mengutamakan nilai partisipatif, inklusivitas, dan inovasi sosial. Dalam konteks ASEAN yang tengah mencari model integrasi pasca-2025, ASEAN SEDP menawarkan arah baru yang tidak hanya menyatukan ekonomi kawasan, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan kultural antar masyarakat ASEAN secara luas.

Komparasi ASEAN SEDP dengan Entitas Institusional ASEAN Lainnya

Sebagai pelengkap analisis dalam tulisan ini, penting untuk membandingkan ASEAN SEDP dengan entitas institusional lain dalam ekosistem kebijakan ASEAN, khususnya ASEAN-BAC dan ACCMSME, guna memahami posisi dan pendekatan masing-masing dalam mendukung integrasi ekonomi kawasan. ASEAN-BAC, sebagai entitas resmi sejak 2003, berperan memberikan masukan kepada ASEAN *Economic Ministers* (AEM) terkait isu bisnis regional dan menyuarakan kepentingan sektor swasta. Namun, dalam implementasinya, ASEAN-BAC cenderung eksklusif karena didominasi oleh aktor bisnis besar, dengan mekanisme konsultasi *top-down* melalui pertemuan dan forum tingkat tinggi di lingkup regional dan keterlibatan terbatas dari pelaku usaha akar rumput. Keterwakilan yang timpang serta ketidakselarasan internal dalam menyuarakan kepentingan regional, karena perbedaan agenda ekonomi negara anggota dan dominasi kepentingan Ketua, mencerminkan bentuk regionalisasi ASEAN yang terfragmentasi. Meskipun beberapa aktor non-negara, termasuk

masyarakat sipil dan UMKM mencoba terlibat, partisipasi mereka sering terkendala oleh birokrasi yang lamban dan ketidakjelasan mekanisme partisipatif dalam Piagam ASEAN dan mekanisme dalam ASEAN-BAC itu sendiri. Situasi ini mempertegas masih terbatasnya inklusivitas dan keterlibatan lintas sektor dalam proses integrasi ekonomi kawasan di ASEAN-BAC, yang menghambat terciptanya komunitas kawasan yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada masyarakat (Rüland, 2016; Faisal dan Heryanto, 2022).

Serupa dengan ASEAN-BAC, ACCMSME merupakan entitas di bawah struktur kelembagaan ASEAN berupa badan koordinatif yang berperan strategis dalam pengembangan UMKM di kawasan Asia Tenggara. Komite ini melaksanakan berbagai program prioritas, membangun infrastruktur pendukung, serta memfasilitasi pertukaran praktik kebijakan antarnegara anggota guna memperkuat sektor UMKM. Mandat ACCMSME telah diperluas untuk mencakup usaha mikro, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pelibatan aktor-aktor di luar lembaga UMKM formal, termasuk pemangku kepentingan dari sektor terkait lainnya. Melalui forum kerja samanya, ACCMSME menjembatani sinergi antara kebijakan regional ASEAN dan kebijakan nasional, khususnya dalam memperkuat sektor UMKM (Khoirunnisa, 2024; Zuan et.al, 2024). Namun demikian, pendekatan yang bersifat antarpemerintah dan teknokratik membuat partisipasi komunitas serta pelaku usaha sosial kurang terakomodasi secara langsung dalam proses perumusan kebijakan. Selain itu, fokus pada entitas formal UMKM menyebabkan inisiatif berbasis komunitas dan pelaku usaha informal seringkali berada di luar cakupan sistem hukum komersial dan belum mendapatkan perhatian yang memadai.

Dalam konteks inilah, ASEAN SEDP menempati posisi yang unik. Tidak seperti ASEAN-BAC yang cenderung elitis maupun ACCMSME, ASEAN SEDP hadir dengan pendekatan akar rumput yang partisipatif dan berbasis nilai. Berbeda pula dari kedua entitas tersebut yang merupakan bagian dari struktur institusional ASEAN, ASEAN SEDP merupakan program di bawah ASEAN Foundation, bukan entitas kelembagaan tersendiri. Sebagai organisasi yang berada dalam struktur ASEAN, ASEAN Foundation memiliki mandat untuk meningkatkan kesadaran dan solidaritas regional melalui interaksi antarwarga serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sejak didirikan, ASEAN Foundation secara konsisten mendukung pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya melalui inisiatif yang melibatkan masyarakat sipil, khususnya generasi muda di Asia Tenggara (Nafisaputri et.al, 2021).

ASEAN SEDP memiliki daya jangkauan yang luas terhadap komunitas akar rumput karena pendekatannya yang berbasis *social enterprise*, yakni menggabungkan misi sosial dan ekonomi serta merespons kebutuhan lokal berbasis tempat melalui integrasi dimensi ekonomi dan sosial. Pendekatan ini lebih memungkinkan untuk menjangkau dan memberdayakan masyarakat sipil dibandingkan dengan pendekatan UMKM konvensional yang cenderung bersifat formal dan berorientasi pasar (Kilpatrick et.al, 2021; Crosta & Sanders, 2021). ASEAN SEDP mengintegrasikan pelatihan kewirausahaan, penguatan kapasitas komunitas, serta

kolaborasi lintas sektor dengan aktor internasional, pelaku usaha, dan platform digital dalam satu kerangka yang terpadu. Selain itu, program ini menerapkan pendekatan *multi-stakeholder partnerships* yang menekankan relasi setara dan saling melengkapi di antara para aktor tanpa dominasi satu pihak tertentu. Dengan karakteristik tersebut, ASEAN SEDP dapat dilihat sebagai manifestasi regionalisme baru yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat Asia Tenggara, yaitu model integrasi kawasan yang berlandaskan pada solidaritas sosial dan partisipasi inklusif, bukan semata-mata pada liberalisasi ekonomi.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana ASEAN SEDP mencerminkan Regionalisme Baru dalam mendorong integrasi ekonomi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, desain, dan implementasi program tersebut, dapat disimpulkan bahwa ASEAN SEDP secara garis besar telah mengadopsi nilai-nilai dari pendekatan Regionalisme Baru, seperti multidimensionalitas, keterlibatan aktor plural, pendekatan *people-centered*, integrasi dari bawah (*bottom-up*), dan orientasi pada pembangunan sosial-ekonomi. Program ini menunjukkan bahwa integrasi kawasan tidak lagi bersifat negara-sentris atau semata-mata fokus pada ekonomi, tetapi juga terbentuk melalui kolaborasi lintas sektor antara aktor publik dan non-publik, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, wirausaha sosial, dan komunitas rentan. Melalui *Multi-Stakeholder Partnerships* (MSPs), ASEAN SEDP memperkuat jejaring solidaritas sosial di kawasan dan membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya inklusivitas serta dampak sosial yang berkelanjutan. Dengan menempatkan wirausaha sosial sebagai aktor utama, program ini telah membuka ruang partisipatif bagi generasi muda untuk terlibat dalam pembangunan kawasan sekaligus menciptakan model ekonomi baru yang adaptif dan kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga memperkaya pemahaman mengenai bentuk integrasi regional yang lebih partisipatif dan transformatif.

Berdasarkan temuan ini, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh ASEAN kedepannya. Pertama, ASEAN perlu mengadopsi prinsip-prinsip dan praktik ASEAN SEDP ke dalam kebijakan regional yang lebih luas, terutama dalam desain program penguatan UMKM dan pembangunan sosial-ekonomi. Kedua, negara anggota sebaiknya memberikan dukungan kelembagaan dan regulatif terhadap pengembangan kewirausahaan sosial, termasuk melalui pengakuan hukum, akses pendanaan, dan integrasi ke dalam sistem pengadaan publik. Ketiga, ASEAN Foundation dan mitra pelaksana perlu memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data untuk memastikan keberlanjutan dampak serta meningkatkan replikasi praktik terbaik di negara-negara anggota lainnya. Dengan mengutamakan pendekatan inklusif dan berbasis komunitas sebagaimana diusung ASEAN SEDP, ASEAN dapat memperkuat arah integrasi ekonomi kawasan yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chandra, A. C., Abdulrahim, R., & Almuttaqi, A. I. (2017). Non-state actors' engagement with ASEAN: Current state of play and way forward. In A. A. Baviera (Ed.), *Building ASEAN community* (pp. 221–246). Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).
- Chandra, A. C., Abdulrahim, R., & Almuttaqi, A. I. (2017). Non-state actors' engagement with ASEAN: Current state of play and way forward. In B. A. Maramis (Ed.), *ASEAN @ 50 Volume 4: Building ASEAN community: Political-security and socio-cultural reflections* (pp. 221–246). ERIA.
- Brouwer, H., Woodhill, A. J., Hemmati, M., Verhoosel, K. S., & van Vugt, S. (2015). *The MSP guide: How to design and facilitate multi-stakeholder partnerships*. Wageningen UR.
- Hettne, B. (2003). The new regionalism revisited. In F. Söderbaum (Ed.), *Theories of new regionalism* (pp. 22–42). Palgrave Macmillan.
- Söderbaum, F. (2003). Introduction: Theories of new regionalism. In F. Söderbaum (Ed.), *Theories of new regionalism*. Palgrave Macmillan.
- Hildebrandt, T., & Halver, W. (2023). Economic integration the ASEAN way: How to narrow development gap. In M. Ling (Ed.), *ASEAN's critical assessment and practical reforms* (pp. 66–79). Konrad Adenauer Stiftung.
- Maria, R. S., Urata, S., & Intal, P. S. Jr. (2017). *The ASEAN Economic Community into 2025 and beyond*. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).
- Zuan, H., Abd Razak, M. F., & Ramli, I. M. (2024). *Empowering micro businesses in Southeast Asia: Addressing challenges and harnessing opportunities for ASEAN economic integration*. ERIA.

Artikel Jurnal

- Basir, S. M., & Abd Aziz, S. N. (2018). Development gaps in ASEAN as crucial security issues: A challenge to ASEAN integration. *ASEAN Journal of Legal Studies*, 1(1), 28–35. <https://ssrn.com/abstract=3296811>
- Bøås, M., Marchand, M. H., & Shaw, T. M. (1999). The weave-world: Regionalisms in the South in the new millennium. *Third World Quarterly*, 20(5), 1061–1070.
- Eweje, G., Sajjad, A., Nath, S. D., & Kobayashi, K. (2021). Multi-stakeholder partnerships: A catalyst to achieve sustainable development goals. *Marketing Intelligence & Planning*, 39(2), 186–212. <https://doi.org/10.1108/MIP-04-2020-0135>
- Grant, J. A., Issa, A., Söderbaum, F., & Yusuf, B. (2022). Regionalism beyond state-centrism: African regionalism in comparative perspective. *International Journal*, 77(3), 449–468. <https://doi.org/10.1177/00207020231156136>
- Ishikawa, K. (2021). The ASEAN Economic Community and ASEAN economic integration. *Journal of Contemporary East Asian Studies*, 10(1), 24–41. <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1891702>
- Karim, M. F., & Heryanto, T. Q. (2022). Regional integration and business interest: Understanding the role of the ASEAN Business Advisory Council. *Asian Journal of Political Science*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/02185377.2022.2112402>
- Khoirunnisa, N. (2024). Peran dan manfaat kerja sama di bawah forum ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small, and Medium Enterprises (ACCMSME) bagi UMKM



- Indonesia. *Global Mind*, 6(2), 10–24. <https://doi.org/10.53675/jgm.v6i2.1185>
- Kilpatrick, S., Farmer, J., Emery, S., & DeCotta, T. (2021). Social enterprises and regional cities: Working together for mutual benefit. *Entrepreneurship & Regional Development*, 1–17. <https://doi.org/10.1080/08985626.2021.1899293>
- Nafisaputri, A., Perbawasari, S., & Nugraha, A. R. (2021). Strategi komunikasi organisasi nonprofit ASEAN Foundation dalam meningkatkan kesadaran ASEAN. *AGUNA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 28–42. <https://doi.org/10.35671/aguna.v2i2.1255>
- Park, C.-Y. (2024). ASEAN economic integration: Addressing challenges and embracing opportunities. *Asian Economic Policy Review*, 19(2). <https://doi.org/10.1111/aepr.12462>
- Rüland, J. (2016). Why (most) Indonesian businesses fear the ASEAN Economic Community: Struggling with Southeast Asia’s regional corporatism. *Third World Quarterly*, 37(6), 1130–1145. <https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1133245>
- Shimizu, K. (2021). The ASEAN Economic Community and the RCEP in the world. *Journal of Contemporary East Asian Studies*, 10(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1907881>
- Sundram, P. (2025). A study of non-state actors in ASEAN community building post-ASEAN Charter. *International Journal of Asia Pacific Studies*, 21(1), 211–239. <https://doi.org/10.21315/ijaps2025.21.1.8>

Laporan / Report

- ASEAN Business Advisory Council. (2018). *The voice of business in ASEAN: Awareness of responsible and inclusive business policies – A pilot study*. ASEAN CSR Network. <https://www.asean-csr-network.org/c/images/Resources/Reports/ASEAN-Voice-of-Business.pdf>
- ASEAN Secretariat. (2015). *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*. ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2008, January). *ASEAN Economic Community Blueprint*. <https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/archive/5187-10.pdf>
- Chia, S. Y. (2013). *The ASEAN Economic Community: Progress, challenges, and prospects* (ADB Working Paper 440). Asian Development Bank Institute.
- Crosta, N., & Sanders, A. (2021). *Social enterprises and disability: Fostering innovation, awareness, and social impact in the ASEAN region* (ERIA Research Project 2021 No. 12).
- UN DESA. (2018). *Expert group meeting “Youth social entrepreneurship and the 2030 Agenda”*. <https://www.un.org/development/desa/youth/expert-group-meeting-youth-social-entrepreneurship-and-the-2030-agenda.html>
- United Nations. (2015). *Partnership for sustainable development goals: A legacy review towards realizing the 2030 agenda*. <https://sustainabledevelopment.un.org/sdinaction/publication/partnerships-a-legacy-review>
- USAID. (2019). *The social enterprise landscape in ASEAN: A synthesis report*. Nathan Associates Inc.
- Verico, K. (2022). *The ASEAN economic integration principles: Open, convergence, inclusive, and green* (LPEM-FEB UI Working Paper 071)

Artikel Berita

Laoli, N. (2024, December 4). ASEAN Foundation gandeng TikTok dan SAP dukung pengembangan wirausaha sosial di ASEAN. Kontan.id. <https://industri.kontan.co.id/news/asean-foundation-gandeng-tiktok-dan-sap-dukung-pengembangan-wirausaha-sosial-di-asean>

Makalah Diskusi / Konferensi

Chandra, A. C. (2008). The effects of civil society organisations on institutional development and community building in the ASEAN region. Sentosa Roundtable Discussion for Asian Security.

Situs Organisasi Resmi

ASEAN Foundation. (2021, April 16). ASEAN SEDP: Empowering social enterprises to accelerate sustainable development & COVID-19 recovery. https://www.aseanfoundation.org/asean_sedp_empowering_social_enterprises_to_accelerate_sustainable_development_covid_19_recovery

ASEAN Secretariat. (2024, May 7). Major sectoral bodies. <https://asean.org/our-communities/economic-community/resilient-and-inclusive-asean/development-of-micro-small-and-medium-enterprises-in-asean-msme/major-sectoral-bodies/>

ASEAN SEDP. (2021). About ASEAN SEDP. <https://aseansedp.org/about-asean-sedp/>

ASEAN SEDP. (2021). About ASEAN Social Enterprise Development Programme. <https://aseansedp.org/about-asean-sedp/>

Video Wawancara (YouTube)

Amir, E. (2021, December 1). *ASEAN SEDP 2021: Rubysh* [Video]. ASEAN Foundation. <https://www.youtube.com/watch?v=TYe4FsBdv1Y>

Thu, N. T. (2024, July 26). *ASEAN SEDP 2.0: Tohe Project* [Video]. ASEAN Foundation. <https://www.youtube.com/watch?v=tUnr9qVLMG0>

Vongphachanh, M. (2025, August 4). *ASEAN SEDP 3.0: LeLao Project* [Video]. ASEAN Foundation. <https://www.youtube.com/watch?v=-bZf5Z86OWE>